

**PESEPSI SATUAN KERJA TERHADAP PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN  
ASET TETAP PEMERINTAH  
(Survei pada Satuan Kerja  
dalam Wilayah Kerja KPPN Malang)**

**Titian Raharjo**

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, 2013  
Email: raharbridges@gmail.com

**Abstract :** *The Perceptions of Government Agency of Usage and Utilization to Other Party of Government Fixed Assets (Survey on Government Agency on the Working Area of KPPN Malang)* Public sector organizations have a fixed asset in a significant numbers. Given the large numbers, fixed asset management requires serious attention from the asset manager. This study aims to determine perceptions of assets manager on the implementation of the use and the utilization of fixed assets to other parties based on criteria compliance, transparency and accountability, as well as effectiveness and efficiency. The survey was conducted on a working unit within the working area of the Treasury Office (KPPN) of Malang. The survey results were analyzed with descriptive statistics to identify trends in the perceptions.

**Abstraksi :** *Survei mengenai persepsi satuan kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap pemerintah pada lingkup satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Malang.* Organisasi sektor publik memiliki aset tetap dalam jumlah yang signifikan. Mengingat jumlahnya yang besar, pengelolaan aset tetap membutuhkan perhatian yang serius dari para pengelola aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi pengelola aset satuan kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap berdasarkan kriteria kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Survei dilakukan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja KPPN Malang. Hasil survei dianalisa dengan statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan persepsi satuan kerja.

**Kata kunci:** *persepsi, manajemen aset, aset tetap pemerintah.*

## **PENDAHULUAN**

Aset merupakan investasi yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh setiap organisasi sektor publik. Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan aset dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pemerintah harus mampu mempergunakan aset negara tersebut semaksimal mungkin untuk tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Pusat mencatat jumlah aset mencapai lebih dari Rp 3.200 triliun pada pertengahan tahun 2012 (LKPP Semester 1 tahun 2012). Di dalamnya mencakup aset lancar sebesar Rp 463,9 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp 800,4 triliun, aset tetap sebesar Rp 1.606,6 triliun, dan aset lainnya sebesar Rp. 388,4 triliun. Nilai aset tersebut lebih besar daripada akhir

tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3.023,4 triliun. Dari total aset yang tercatat, kontribusi terbesar berasal dari aset tetap.

Reformasi birokrasi dalam keuangan negara tidak hanya membawa perubahan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga dalam melaksanakan pengelolaan aset negara. Sejak tahun 2006, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMND) dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan pengelolaan aset/BMN oleh instansi Pemerintah. Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Perubahan paradigma pengelolaan aset di antaranya ditandai dengan dipisahkannya kewenangan terkait pengelolaan aset. Kewenangan tersebut diserahkan kepada pejabat pengelola barang dan pejabat pengguna barang. Kewenangan sebagai pengelola barang diserahkan kepada Menteri Keuangan yang juga bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pimpinan Kementerian/Lembaga menjadi pihak pengguna barang yang menggunakan BMN sesuai tugas dan fungsi kementerian. Pembagian kewenangan tersebut juga menghilangkan paradigma lama tentang pemilik aset. Anggapan bahwa pihak yang menguasai aset adalah pemilik aset dan berhak untuk melakukan tindakan apapun terkait aset yang mereka miliki perlu diluruskan. Pihak yang menguasai aset bukanlah pemilik aset, tetapi hanya pengguna yang memperoleh manfaat dari aset negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menyoroti masalah pengelolaan dan penatausahaan aset sebagai salah satu penyebab pemberian opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga yang tidak memperoleh opini WTP pada tahun anggaran 2011 antara lain adalah permasalahan pengelolaan akun kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Pada tahun 2012 juga masih ditemukan ada kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap.

Berbagai masalah terkait pengelolaan aset pemerintah belum dapat diselesaikan hingga kini. Sebagai contoh, hingga tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami masalah dengan pemetaan aset, terutama karena adanya sengketa dengan pihak lain (*nasional.kompas.com*, 14/02/2012). Sertifikasi tanah menjadi problematika tersendiri. Setidaknya 3.750 bidang tanah di seluruh Kementerian/Lembaga belum memperoleh sertifikat atas nama Pemerintah hingga akhir tahun 2012. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya untuk menyelesaikan pensertifikasian tanah negara tersebut hingga akhir tahun 2013 (*finance.detik.com*, 02/10/2012).

Secara umum, permasalahan dalam pengelolaan aset/BMN yang terjadi dalam pemerintahan di antaranya (Waloejo, 2012) adalah:

1. Pengelolaan aset, terutama pemanfaatan, pemusnahan atau pemindahtanganan aset tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: (a) Tidak memenuhi syarat dan/atau prosedur (b) tanpa persetujuan

pejabat yang berwenang, (c) tidak melalui proses tender/lelang, (d) harga/tarif tidak wajar, ataupun (e) hasil penerimaan tidak disetor ke rekening kas negara

2. Adanya aset-aset yang berlebih dan/atau *idle* belum digunakan dan/atau dimanfaatkan secara optimal.
3. Ketidakjelasan status dan sengketa kepemilikan dan/atau penguasaan aset oleh instansi pemerintah, pusat, daerah maupun dengan pihak lain.
4. Gugatan dari pihak lain atas kepemilikan dan/atau penguasaan aset oleh pemerintah pusat dan/atau daerah.
5. Okupansi/penguasaan aset negara/daerah oleh pihak lain.
6. Berkurangnya/hilangnya aset milik negara/daerah.
7. Di satu pihak banyak Kementerian/Lembaga yang menguasai tanah dan/atau bangunan yang berlebihan dan *idle* sedangkan di lain pihak masih ada Kementerian Lembaga yang kekurangan tanah bangunan.

Pimpinan satuan kerja (satker) merupakan kuasa pengguna barang yang mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, dan penatausahaan BMN (aset) yang berada dalam penguasaannya dari pimpinan Kementerian/Lembaga. Unit satker merupakan unit kerja teknis (*lower management*) yang secara langsung menggunakan aset untuk melaksanakan tugas dan fungsi satker tersebut. Masing-masing satker memiliki aset dalam jumlah dan nilai yang berbeda. Juga tidak semua satker memiliki kebutuhan yang sama terhadap aset. Ada satker yang memiliki aset sedikit tetapi sebenarnya membutuhkan lebih banyak aset. Di sisi lain mungkin terdapat satker yang memiliki banyak aset, tetapi sebenarnya kebutuhannya sedikit dan telah terpenuhi.

Penggunaan aset adalah saat di mana satker mengambil manfaat atas aset dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset menganggur (*idle*) karena satker tidak dapat menggunakannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Aset yang *idle* tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aset *idle* masih dapat digunakan sebagai fungsi *budgeter*, yaitu untuk memperoleh pendapatan negara. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan aset dengan menyerahkan sejumlah imbalan tertentu. Dalam terminologi pengelolaan aset, hal ini disebut sebagai pemanfaatan aset. Opsi pemanfaatan yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan aset di antaranya adalah dengan menyewakan aset kepada pihak lain. Aset juga dapat dipergunakan sebagai bagian dalam kontrak kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap merupakan kegiatan yang secara *continue* dilaksanakan dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan asas kepastian hukum, praktik pengelolaan aset pada satker sudah seharusnya mengikuti pedoman pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat berbeda-beda menurut persepsi pengelola barang dari masing-masing satuan kerja. Untuk melihat sejauh mana persepsi satker atas pelaksanaan

pengelolaan aset tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap persepsi satuan kerja atas pelaksanaan pengelolaan aset terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki oleh kuasa pengguna barang. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei pada instansi pemerintah yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut :

1. Bagaimana persepsi satuan kerja terhadap pelaksanaan penggunaan aset tetap berdasarkan kriteria kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas, dan efektivitas dan efisiensi?
2. Bagaimana persepsi satuan kerja terhadap pelaksanaan pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain berdasarkan kriteria kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas, dan efektivitas dan efisiensi?

### **Batasan Penelitian**

Penelitian dilakukan hanya terbatas pada pengamatan atas persepsi satker terhadap praktik pengelolaan aset terutama dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap dengan melakukan survei pada satker pengguna barang yang berada pada wilayah kerja KPPN Malang.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan menurut Kieso (2012:216) aset adalah *probable future economics benefits obtained or controlled by a particular entity as result of past transactions or events*.

Menurut SAP aset dapat diklasifikasikan ke dalam dua kriteria, yaitu aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset tetap sendiri diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dapat digolongkan menjadi 6 klasifikasi, yaitu: (1) Tanah, (2) Gedung dan Bangunan, (3) Peralatan dan Mesin, (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, dan (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

#### **Pengelolaan Aset**

Menurut Britton, et all (1989) dalam Siregar (2004:517) mendefinisikan bagaimana manajemen aset adalah tentang *"define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing*

*the minimum amount of expenditure on its management*". Menurut Siregar (2004:518-519), manajemen aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi. Kelima kegiatan tersebut adalah : (1) Inventarisasi Aset, (2) *Legal Audit*, (3) Penilaian Aset, (4) Optimalisasi Aset, dan (5) Pengawasan dan Pengendalian.

Sedangkan menurut PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan aset/BMN adalah kegiatan yang meliputi : (a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (b) Pengadaan, (c) Penggunaan, (d) Pemanfaatan, (e) Pengamanan dan pemeliharaan, (f) Penilaian, (g) Penghapusan, (h) Pemindahtanganan, (i) Penatausahaan, (j) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas : (a) fungsional, (b) kepastian hukum, (c) transparansi, (d) efisiensi, (e) akuntabilitas, dan (f) kepastian nilai.

Kewenangan pengelolaan aset/BMN berada di tangan Presiden, yang kemudian didelegasikan kepada pejabat pengguna barang dan pengelola barang. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Setiap pimpinan Kementerian/Lembaga adalah pengguna barang yang memiliki hak dan kewajiban terkait penggunaan barang yang berada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga. Unit yang secara langsung menguasai BMN untuk dikelola dan dipergunakan dalam kegiatan operasionalnya dibawah pimpinan kementerian/Lembaga disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Kewenangan ini diberikan kepada Menteri Keuangan dan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Penggunaan aset adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang satker dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satker perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan aset dapat dilakukan dengan cara sewa; pinjam pakai; Kerja sama pemanfaatan; Sewa Guna Serah dan Sewa Serah Guna. Secara singkat sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Sewa guna serah adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan sewa serah guna adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

### **Persepsi Satker**

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif (Robbins, 2006:169).

Persepsi individu dalam satuan kerja digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan aset pada satuan kerja. Persepsi individu yang langsung berhubungan dengan pengelolaan aset diharapkan dapat menggambarkan bagaimana keadaan pengelolaan aset satuan kerja. Persepsi tersebut diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan mengenai pengelolaan aset yang dialami atau dirasakan langsung oleh individu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan melakukan survei pada satker yang berada di wilayah kerja KPPN Malang. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009:26). Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis. Data penelitian berupa data subyek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subyek penelitian secara individual atau secara kelompok (Indriantoro dan Supomo, 2009:152). Ada dua teknik pengumpulan data dalam metode survei, yaitu wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan metode kuesioner.

Populasi adalah seluruh satker yang berada dalam lingkup wilayah kerja KPPN Malang yang berjumlah 160 satker. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dimana peneliti memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel diperoleh dengan menunggu elemen populasi datang ke KPPN Malang untuk memperoleh pelayanan dari KPPN (di antaranya berupa penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan pelayanan rekonsiliasi keuangan), sehingga tidak perlu mendatangi lokasi elemen populasi. Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh angka sampel minimal 62 responden (pembulatan) dari masing-masing satker.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dari satker. Masing-masing kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5. Pertanyaan tersebut dinilai dengan skala 1 untuk alternatif jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral/ragu-ragu, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Untuk pertanyaan yang bersifat negatif maka penilaian

dilakukan sebaliknya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan KPPN Malang, LKPP yang dipublikasikan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB), dan publikasi dari BPK RI melalui media internet.

### Variabel Operasional

Persepsi responden diamati berdasarkan variabel yang menjadi kriteria bagaimana pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap pemerintah. Variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan  
Kepatuhan adalah kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi dan akuntabilitas  
Transparansi bermakna bahwa dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Sedangkan akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan/atau menerangkan kinerja pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap kepada pihak-pihak yang berkewenangan menerima pertanggungjawaban tersebut.
3. Efektivitas dan efisiensi  
Efektivitas adalah tingkat keberhasilan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap. Sedangkan efisien bermakna bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset tetap diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Masing-masing kriteria tersebut dijelaskan dalam tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Variabel Operasional**

Variabel	Indikator	Instrumen Pengukuran (singkat)
Kepatuhan dalam Penggunaan Aset Tetap	Kesesuaian	Kesesuaian dengan aturan
		Ketetapan status penggunaan aset
		Kesesuaian kegiatan aset tetap dengan aturan
	Kewenangan	Ketiadaan tumpang tindih kewenangan
	<i>Legal Aspect</i>	Pemenuhan persyaratan <i>legal aspect</i> aset tetap
Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Aset Tetap	Transparansi	Kesesuaian penggunaan aset dengan keputusan
		Keberadaan dan penggunaan aset tetap diketahui staf
		Penggunaan aset untuk penyelenggaraan tupoksi
	Akuntabilitas	Laporan disusun tertib, tepat waktu, sesuai keadaan
		Informasi dapat disajikan segera
Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Aset Tetap	Efektivitas dan Efisiensi	Penggunaan aset tetap efektif dan efisien
		Jumlah dan jenis aset tetap sesuai kebutuhan instansi
		Ketercukupan aset menyelenggarakan tupoksi
	Aset tetap <i>idle</i>	Ketiadaan aset tetap yang menganggur ( <i>idle</i> )
		Ketiadaan aset tetap <i>idle</i> tanpa pemeliharaan

**Tabel 1**  
**Variabel Operasional** (lanjutan)

Variabel	Indikator	Instrumen Pengukuran
Kepatuhan dalam Pemanfaatan Aset Tetap	Kesesuaian	Kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan
		Keberadaan ketetapan status pemanfaatan aset
		Kesesuaian kontrak perjanjian dengan aturan
	Kepemilikan	Ketiadaan perpindahan kepemilikan aset tetap
	<i>Legal Aspect</i>	Pemenuhan persyaratan <i>legal aspect</i> aset tetap
Transparansi dan Akuntabilitas Pemanfaatan Aset Tetap	Transparansi	Kesesuaian pemanfaatan aset tetap dengan keputusan
		Keberadaan dan pemanfaatan aset diketahui staf
		Pemilihan pihak lain sesuai aturan
	Akuntabilitas	Laporan disusun tertib, tepat waktu, sesuai keadaan
		Informasi dapat disajikan segera
Efektivitas dan Efisiensi dalam Pemanfaatan Aset Tetap	Efektivitas	Aset yang tidak dipergunakan instansi
		Adanya imbalan (PNBP) atas pemanfaatan aset tetap
		Imbalan sesuai dengan tarif dan aturan
		Keputusan pemanfaatan aset tetap sudah tepat
	Efisiensi	Ketiadaan pihak memanfaatkan secara tidak berhak
		Ketiadaan penurunan kemampuan instansi

Pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam survei ini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan uji instrumen berupa uji pilot dan uji lapangan akhir terhadap kuesioner penelitian. Uji pilot dilakukan menggunakan responden yang memiliki latar belakang berasal dari satker pemerintah, khususnya satker instansi vertikal DJPB. Uji lapangan akhir menggunakan responden sebenarnya, yakni para pengelola keuangan/barang pada satker yang berada dalam wilayah kerja KPPN Malang.

#### **Metode Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), nilai terbanyak (*modus*), dan standar deviasi. Analisa dilakukan dengan cara:

1. Menghitung dan menjelaskan nilai terbanyak (*modus*) untuk menggambarkan pendapat dipilih oleh responden dalam suatu kriteria.
2. Menghitung dan menjelaskan nilai rata-rata (*mean*) sebagai nilai pemusatan untuk mengambil kesimpulan akhir dalam suatu kriteria.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah satker-satker yang berada pada lingkup wilayah kerja KPPN Malang. Jumlah satker yang menjadi objek penelitian berdasarkan satker yang terdaftar sebagai satker yang melaksanakan pencairan dana di KPPN pada tahun anggaran 2012 yang berjumlah 160 satker yang tersebar di lima wilayah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu.

Responden adalah pejabat atau staf keuangan yang diperkirakan melaksanakan atau mengetahui pengelolaan aset pada satker. Kuesioner disebarkan pada saat awal bulan di mana saat tersebut adalah masa rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pemilihan masa rekonsiliasi sebagai waktu

penyebaran kuesioner, dilakukan untuk mempermudah penyebaran kuesioner bagi peneliti, di mana target responden yang berlokasi tersebar di lima wilayah yang sangat luas berdatangan ke KPPN untuk melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan. Selain menyerahkan kuesioner kepada responden secara langsung, peneliti juga mengirimkan kuesioner melalui surat elektronik.

Dari 120 lembar kuesioner yang disebar, sebanyak 79 lembar kuesioner (65,83%) diterima kembali oleh peneliti yang terdiri dari 67 lembar yang diterima secara langsung dan 12 lembar diterima melalui surat elektronik. Dari jumlah yang diterima, 72 lembar (91%) dipergunakan dalam uji statistik penelitian ini. Sisanya 7 lembar tidak dipakai karena tidak diisi dengan lengkap.

**Tabel 2**  
**Gambaran Umum Responden**

Uraian		jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	60	76%
	Perempuan	19	24%
Pendidikan	SMU	7	9%
	D1/D2	6	8%
	D3	9	11%
	S1	48	61%
	S2	2	3%
	Jawaban kosong	7	9%
Jabatan	Kepala Kantor	0	0%
	Kepala Seksi	4	5%
	Bendahara	20	25%
	Staf Keuangan	50	63%
	Jawaban kosong	5	6%
Lama Menjabat	< 2 Tahun	23	29%
	2-5 tahun	27	34%
	> 5 Tahun	19	24%
	Jawaban kosong	10	13%
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Satker yang berada dalam wilayah kerja KPPN Malang memiliki berbagai aset dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan instansi. Jumlah aset yang dimiliki dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara yang disusun KPPN.

**Tabel 3**  
**Jumlah Aset Satker wilayah KPPN Malang** (dalam Rupiah)

Jenis aset	2012	2011
<b>Aset</b>	<b>8.110.354.847.943</b>	<b>7.206.297.533.693</b>
Aset Lancar	<b>1.885.692.266.254</b>	<b>2.143.828.860.509</b>
Aset Tetap	<b>6.165.221.147.003</b>	<b>5.054.840.291.814</b>
Tanah	3.322.951.808.192	2.928.789.874.400
Peralatan dan Mesin	811.938.742.892	572.581.680.213
Gedung dan Bangunan	1.091.444.369.451	972.843.414.611
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.520.161.423	57.841.866.200
Aset Tetap Lainnya	95.788.322.608	231.422.305.978
Konstruksi dalam Pengerjaan	847.618.065.283	291.361.150.412
Aset Lainnya	<b>59.441.434.686</b>	<b>7.628.381.370</b>

Sumber : Neraca Tingkat Kuasa BUN KPPN Malang (diolah).

Dapat dilihat bahwa nilai aset tetap yang dimiliki oleh seluruh satker di wilayah Malang dan sekitarnya adalah sejumlah Rp. 6.165 miliar pada akhir tahun 2012. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.110 miliar (22%) dibandingkan jumlah aset tetap pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut hanya merupakan gambaran tentang seberapa besar nilai aset yang dimiliki dan dikuasai oleh satker di wilayah Malang dan sekitarnya.

### Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner pilot menunjukkan bahwa data telah valid dan reliabel, sehingga pertanyaan dalam kuesioner pilot dapat dipergunakan sebagai pertanyaan dalam kuesioner lapangan. Data yang diperoleh dari kuesioner lapangan dilakukan uji validitas dan reliabilitas seperti halnya pada uji pilot. Hasil uji pada data dari kuesioner lapangan menunjukkan bahwa data telah valid dan reliabel, sehingga data tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dalam tahapan berikutnya.

### Analisis Persepsi Penggunaan Aset Tetap

Kepatuhan menunjukkan bagaimana satker menggunakan aset sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan lima item pertanyaan yang masing-masing diukur dengan skala likert dari 1 sampai dengan 5. Penentuan skor dilakukan dengan melihat tingkat persetujuan dari pernyataan yang diberikan. Sangat tidak setuju memperoleh nilai 1, hingga sangat setuju diberikan nilai 5. Kecuali item nomor 4 yang diberi skor sebaliknya. Dari 5 buah pertanyaan tersebut, diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Kuesioner Persepsi Kepatuhan Penggunaan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kesesuaian dengan ketentuan	3,94	1	1%	0	0%	10	14%	52	72%	9	13%
2	Ketetapan status penggunaan aset	3,93	1	1%	0	0%	7	10%	57	79%	7	10%
3	Kesesuaian kegiatan aset dengan peraturan	3,96	1	1%	0	0%	7	10%	57	79%	7	10%
4	Tumpang tindih kewenangan	3,53	2	3%	7	10%	19	24%	41	57%	4	6%
5	Persyaratan <i>legal aspect</i>	3,85	1	1%	0	0%	16	22%	47	65%	8	10%
		3,84	6	2%	7	2%	63	18%	246	68%	38	11%

Sumber : Data primer (diolah).

Sebagian besar jawaban responden berada di skor 4, yang berarti sebagian besar responden menyatakan sikap setuju terhadap lima pernyataan yang diajukan peneliti. Sebagian lainnya memilih sikap pada skor 3 dan 5. Hal tersebut bisa disebabkan perbedaan persepsi masing-masing responden dalam memahami pelaksanaan ketentuan penggunaan aset di masing-masing satker. Nilai rata-rata keseluruhan lima pertanyaan berada pada skor 3,84 yang menunjukkan persepsi responden yang setuju bahwa instansi pemerintah tempat mereka bertugas telah melaksanakan pengelolaan aset berupa penggunaan aset tetap sesuai dengan ketentuan.

Persepsi atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan aset tetap diukur dengan 5 item pertanyaan yang masing-masing diukur dengan skala Likert dengan hasil kuesioner disajikan dalam tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Kuesioner Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas**  
**Penggunaan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Penggunaan aset sesuai keputusan	3,83	1	1%	2	3%	13	18%	48	67%	8	11%
2	Keberadaan dan penggunaan aset diketahui staf	3,92	0	0%	3	4%	9	13%	51	71%	9	13%
3	Penggunaan aset untuk penyelenggaraan tupoksi	4,01	1	1%	1	1%	6	8%	52	72%	12	17%
4	Laporan tertib, tepat waktu, dan sesuai keadaan	3,89	0	0%	3	1%	12	17%	47	65%	10	14%
5	Informasi dapat disajikan segera	3,97	0	0%	0	0%	12	17%	50	69%	10	14%
		3,93	2	1%	9	2%	52	14%	248	69%	49	14%

Sumber : Data primer (diolah).

Responden menyatakan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan penggunaan aset tetap secara transparan dan akuntabel. Dari seluruh responden, 69% menyatakan setuju. Selebihnya menyatakan ragu-ragu (14%) dan sangat setuju (14%). Sedikit sekali responden yang menyatakan tidak setuju (yaitu 2%) dan sangat tidak setuju (1%). Rata-rata total pada nilai 3,93 menunjukkan responden menyatakan sikap setuju terhadap penggunaan aset tetap telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Persepsi responden menunjukkan bahwa mereka percaya penggunaan aset tetap dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, satker menyusun laporan keuangan tingkat unit kuasa pengguna anggaran (UAKPA) yang disampaikan kepada KPPN dan unit akuntansi di atasnya (UAPA-W dan UAPA-E1). Satker juga secara aktif melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk menjamin akurasi pencatatan keuangan. Laporan keuangan merupakan gabungan dari data realisasi anggaran dan laporan barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna disusun tiap semester untuk melaporkan jumlah dan nilai persediaan dan aset tetap yang dikelola oleh satker. Laporan tersebut disampaikan kepada unit instansi vertikal di atasnya dan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) instansi vertikal DJKN Kementerian Keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya tentang laporan barang satker, kualitas laporan barang dapat diukur dari indikator keandalan, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Kualitas laporan barang dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (Darno, 2013).

Persepsi atas efektifitas dan efisiensi penggunaan aset tetap dinilai dengan menggunakan lima item pertanyaan dengan skala likert. Hasil yang

diperoleh ditunjukkan dalam tabel 6.

**Tabel 6**

**Hasil Kuesioner Persepsi Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Penggunaan aset efektif & efisien	4,06	1	1%	2	3%	3	4%	52	72%	14	19%
2	Jumlah dan jenis aset	3,90	1	1%	3	4%	7	10%	52	72%	9	13%
3	Ketercukupan aset menyelenggarakan tupoksi	2,64	10	14%	26	36%	18	25%	16	22%	2	3%
4	Ketiadaan aset menganggur ( <i>idle</i> )	3,39	2	3%	13	18%	17	24%	35	49%	5	7%
5	Ketiadaan aset <i>idle</i> tanpa pemeliharaan	3,65	3	4%	5	7%	15	21%	40	56%	9	13%
		3,53	17	5%	49	14%	60	17%	195	54%	39	11%

Sumber : Data primer (diolah).

Responden yang menjawab setuju untuk pertanyaan tentang kriteria efektivitas dan efisiensi penggunaan aset tetap sebesar 54%. Selebihnya menjawab ragu-ragu 17% dan tidak setuju 14% dari total seluruh responden. Sebagian kecil lainnya menjawab sangat setuju (11%) dan sangat tidak setuju (5%). Lebih dari setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa penggunaan aset tetap dianggap telah efektif dan efisien (72% setuju). Jumlah dan jenis aset tetap yang dimiliki satker pun diakui banyak dan beragam (72% setuju). Mengenai ketercukupan aset tetap yang dimiliki satker dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi satker, jawaban responden berkisar antara tidak setuju (36%), ragu-ragu (25%) dan setuju (22%). Rata-rata nilai 2,64 untuk item pertanyaan 3 menunjukkan bahwa responden menganggap aset tetap yang dimiliki oleh satker masih belum mencukupi kebutuhan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi satker. Hal ini sedikit menimbulkan kontradiksi, jika aset tetap yang dimiliki untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi satker masih belum mencukupi kebutuhan, apakah penggunaannya bisa efektif dan efisien? Sedangkan menurut responden, satker tidak memiliki aset tetap yang menganggur (*idle*) yang tidak dipakai dalam operasional instansi (49% setuju). Dengan rata-rata nilai jawaban responden berada dalam angka 3,53 menunjukkan bahwa responden masih berada antara ragu-ragu dengan setuju bahwa penggunaan aset tetap telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**Persepsi Pemanfaatan Aset Tetap**

Pemanfaatan merupakan kegiatan untuk memberdayakan aset pemerintah yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satker pemerintah. Dengan diberdayakan oleh pihak lain, aset tidak menganggur begitu saja dan dapat mendatangkan penghasilan bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk memperoleh informasi mengenai jumlah dan nilai aset tetap yang diberdayakan oleh pihak di luar satker pengguna barang dibutuhkan penelitian

yang lebih dalam terhadap satker. Responden tidak begitu saja memberikan informasi tentang hal tersebut melalui kuesioner. Melalui kuesioner yang disebar secara bebas (bukan data resmi), responden memberikan jawaban mengenai metode pemanfaatan apa yang dilaksanakan oleh satker pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Kuesioner Metode Pemanfaatan Aset Tetap**

Metode Pemanfaatan	Ada	Tidak Ada	Tidak Menjawab
Sewa	15	30	27
Pinjam	6	42	24
Kontrak Kerjasama	11	36	25
Bangun Guna Serah	1	42	29
Bangun Serah Guna	2	41	29

Sumber : Data primer (diolah).

Sedikitnya jumlah satker yang melaksanakan pemanfaatan aset tetap kepada pihak lain mungkin disebabkan hanya sedikit jumlah satker yang memiliki aset yang berlebih yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional mereka. Responden kebanyakan menyatakan bahwa mereka antara ragu-ragu (25%), tidak setuju (36%), dan sangat tidak setuju (14%) tentang kecukupan jumlah dan jenis aset tetap yang dimiliki instansi (tabel 6). Jika jumlah aset tetap yang ada tidak mencukupi kebutuhan operasional, maka seharusnya tidak ada aset tetap yang diserahkan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Meskipun begitu, ada kemungkinan bahwa aset tetap yang dimiliki belum mencukupi kebutuhan operasional satker, tetapi di sisi lain masih terdapat aset tetap yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

PNBP yang diterima pemerintah di wilayah Malang dan sekitarnya dari pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain selama tahun 2011 dan 2012 berjumlah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Jumlah PNBP dari Pemanfaatan Aset Tetap** (dalam Rupiah)

Jenis Penerimaan	Estimasi	Realisasi Pendapatan
<b>Pendapatan dari Pemanfaatan Aset tahun 2012</b>		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	184.531.601	1.331.926.114
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	177.557.500	81.958.752
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	3.500.000	577.643.038
Jumlah	<b>365.589.101</b>	<b>1.991.527.904</b>
<b>Pendapatan dari Pemanfaatan Aset tahun 2011</b>		
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	80.497.440	599.342.005
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	183.008.000	556.749.694
Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	-	18.020.000
Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	36.800.000	798.835.164
Jumlah	<b>300.305.440</b>	<b>1.972.946.863</b>
Catatan : Jenis pendapatan dari pemanfaatan aset tahun 2012 dan 2011 berbeda karena terdapat perubahan kodefikasi akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) di antara tahun tersebut.		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kuasa BUN KPPN Malang (diolah).

Jumlah penerimaan dari pemanfaatan aset tetap yang diterima pada tahun 2012 dan 2011 masih memiliki nilai yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah total aset tetap yang dimiliki satker (0,039% tahun 2011 dan 0,032% tahun 2012). Tetapi jumlah penerimaan dari pemanfaatan aset tetap tersebut

tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan jumlah aset tetap karena sebagian besar aset digunakan untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi satker, bukan untuk dimanfaatkan kepada pihak lain.

Salah satu yang patut diperhatikan adalah perbedaan mencolok antara estimasi penerimaan dengan realisasi penerimaan dari pemanfaatan aset tetap. Setiap tahun satker melakukan estimasi berapa jumlah penerimaan yang bisa diperoleh dari pemanfaatan aset tetap. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan mencapai 657% dari estimasi, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 545%. Nilai realisasi penerimaan yang berjumlah beberapa kali lipat dari estimasi dapat mengindikasikan kurang seriusnya perencanaan terhadap pemanfaatan aset tetap. Perencanaan pendapatan dari pemanfaatan aset tetap kepada pihak lain dapat dilihat dari realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan nilai kontrak perjanjian pemanfaatan aset di tahun berikutnya. Realisasi penerimaan yang meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi tanda adanya potensi untuk meningkatkan estimasi penerimaan di tahun yang akan datang. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kekhawatiran estimasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesulitan bagi satker instansi untuk mencapainya.

Pengamatan terhadap persepsi atas kepatuhan pemanfaatan aset tetap diperoleh hasil seperti dalam tabel 9.

**Tabel 9**  
**Hasil Kuesioner Persepsi Kepatuhan Pemanfaatan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kesesuaian dengan ketentuan	3,75	1	1%	2	3%	19	26%	42	58%	8	11%
2	Ketetapan status pemanfaatan aset	3,72	1	1%	1	1%	22	31%	41	57%	7	10%
3	Kesesuaian kontrak dengan peraturan	3,69	1	1%	1	1%	24	33%	39	54%	7	10%
4	Ketiadaan perpindahan kepemilikan aset	3,51	4	6%	6	8%	20	28%	33	46%	9	13%
5	Persyaratan <i>legal aspect</i> aset	3,58	2	3%	2	3%	26	36%	36	50%	6	8%
		3,65	9	3%	12	3%	111	31%	191	53%	37	10%

Sumber : Data primer (diolah).

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden berada di angka 4 (53%) dan 3 (31%). Hal tersebut bergantung pada persepsi masing-masing responden dalam memahami peraturan yang terkait dengan pemanfaatan aset di lingkup instansi tempat mereka bertugas. Nilai rata-rata keseluruhan lima pertanyaan berada pada angka 3,65. Dari data tersebut dapat dilihat meskipun sebagian besar setuju bahwa pemanfaatan aset tetap di satker mereka telah sesuai dengan ketentuan, tetapi tidak sedikit pula yang meragukan kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan tersebut.

Persepsi transparansi dan akuntabilitas atas pemanfaatan aset tetap diukur dengan 5 item pertanyaan dengan skala likert. Hasil pengamatan data dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10**  
**Hasil Kuesioner Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas**  
**Pemanfaatan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kesesuaian dengan keputusan	3,65	1	1%	2	3%	22	31%	43	60%	4	6%
2	Keberadaan pemanfaatan aset diketahui staf	3,51	3	4%	3	4%	23	32%	40	56%	3	4%
3	Pemilihan pihak lain sesuai aturan	3,72	1	1%	1	1%	20	28%	45	63%	5	7%
4	Laporan tertib, tepat waktu, dan sesuai keadaan	3,71	1	1%	2	3%	22	31%	39	54%	8	11%
5	Informasi dapat disajikan segera	3,75	1	1%	1	1%	21	29%	41	57%	8	11%
		3,67	7	2%	9	3%	108	30%	208	58%	28	8%

Sumber : Data primer (diolah).

Sebagian besar responden menyatakan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan pemanfaatan aset secara transparan dan akuntabel. Dari seluruh responden 59% menyatakan setuju bahwa penggunaan aset telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, meskipun banyak juga yang menyatakan netral/ragu-ragu (30%). Sebagian kecil menyatakan sangat setuju (9%), tidak setuju (2%) dan sangat tidak setuju (2%). Angka rata-rata keseluruhan pada angka 3,67 bisa menunjukkan bahwa terdapat tarik ulur persepsi responden antara setuju dengan ragu-ragu dalam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemanfaatan aset tetap.

Persepsi terhadap efektifitas dan efisiensi atas pemanfaatan aset tetap dinilai dengan menggunakan lima item pertanyaan dengan skala likert. Hasil kuesioner dinyatakan dalam tabel 11.

**Tabel 11**  
**Hasil Kuesioner Persepsi Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Aset Tetap**

Pertanyaan	Uraian singkat	Rata-rata	Nilai skor									
			1		2		3		4		5	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Pemanfaatan aset adalah aset tidak dipergunakan	3,31	2	3%	9	13%	31	43%	25	35%	5	7%
2	Adanya imbalan bagi pemerintah	3,25	3	4%	7	10%	35	49%	23	32%	4	6%
3	Imbalan sesuai tarif & ketentuan	3,68	1	1%	4	6%	26	36%	27	38%	14	19%
4	Keputusan pemanfaatan aset sudah tepat	3,47	1	1%	4	6%	31	43%	32	44%	4	6%
5	Ketiadaan pihak memanfaatkan secara tidak berhak	3,64	2	3%	3	4%	27	33%	33	46%	10	14%
6	Ketiadaan penurunan kemampuan	3,42	4	6%	5	7%	26	36%	31	43%	6	8%
		3,46	13	3%	32	7%	173	40%	171	40%	43	10%

Sumber : Data primer (diolah).

Berdasarkan tabel 11, secara keseluruhan responden menjawab netral/ragu-ragu sebanyak 40% dan menjawab setuju sebanyak 40%. Sisanya menjawab sangat setuju (10%), tidak setuju (7%) dan sangat tidak setuju (3%). Pada item nomor 1 tentang pemanfaatan aset tetap hanya berupa aset tetap yang tidak dipergunakan dalam tugas dan fungsi satker, sejumlah 43% responden menjawab ragu-ragu lebih banyak dari yang menjawab setuju (28%). Begitu juga dengan item nomor 2 tentang imbalan bagi pemerintah dari pemanfaatan aset tetap, sejumlah 49% menjawab ragu-ragu untuk keberadaan dan jumlah imbalan atas pemanfaatan aset, sedangkan 32% menjawab setuju. Secara keseluruhan rata-rata jawaban berada pada angka 3.46. Angka di bawah 3,50 ini mendekati nilai jawaban 3 yang berarti ragu-ragu. Dapat disimpulkan bahwa responden meragukan pernyataan bahwa pelaksanaan pemanfaatan aset tetap telah berjalan secara efektif dan efisien.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa secara umum menurut persepsi responden dari satker instansi pemerintah di kota Malang dan sekitarnya, pelaksanaan penggunaan aset tetap dapat dikategorikan memenuhi azas kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan aset pemerintah, transparan dan akuntabel. Persepsi satuan kerja tetap masih menunjukkan adanya keraguan bahwa penggunaan aset tetap telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Responden mengakui bahwa jumlah aset tetap masih belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja.

Pemanfaatan aset tetap satuan kerja oleh pihak lain telah berjalan dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan, transparan, dan akuntabel menurut persepsi responden dari satuan kerja. Responden meragukan pernyataan mengenai pelaksanaan pemanfaatan aset tetap kepada pihak lain telah berjalan efektif dan efisiensi. Beberapa hal yang diragukan oleh responden mengenai pelaksanaan pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain adalah mengenai persepsi apakah aset tetap yang dimanfaatkan sebenarnya masih diperlukan dalam operasional instansi pengguna barang, apakah keputusan pemanfaatan sudah tepat, dan mengenai kewajaran imbalan (penerimaan negara) yang diperoleh satuan kerja dari pemanfaatan aset tetap.

Saran bagi satker hendaknya meningkatkan pendayagunaan aset tetap di lingkungan mereka. Selain harus tetap menjaga terpenuhinya asas kepatuhan, transparansi, dan akuntabel, penggunaan aset perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya, sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat berjalan tanpa hambatan. Satker juga sebaiknya memaksimalkan pemanfaatan aset tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional satker kepada pihak lain untuk memperoleh penerimaan negara. Perencanaan pemanfaatan perlu lebih diperkuat seperti halnya perencanaan keuangan (belanja). Terhadap satker yang memiliki aset berlebih di satu jenis tetapi kekurangan di jenis aset lain, satker dapat melakukan tukar menukar aset dengan pihak lain yang memiliki kebutuhan yang cocok, sehingga satker dapat memperoleh aset yang sesuai dengan kebutuhannya.

Bagi penelitian berikutnya disarankan untuk memperbaiki instrumen penelitian (kuesioner), memasukkan lebih banyak instrumen pengukuran

pelaksanaan pengelolaan aset. Untuk memaksimalkan akurasi hasil penelitian, peneliti dapat pula melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penggunaan aset tetap dalam satker pengguna barang. Pengamatan langsung akan memberikan gambaran yang lebih objektif daripada mengamati persepsi responden yang cenderung tinggi unsur subyektivitas.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Aulia, Luki, 2012, *Tata Kelola Aset Kemdikbud Bermasalah (Online)*, (<http://nasional.kompas.com/read/2012/02/14/23292940/>), diakses 01 April 2013.

*Badan Pemeriksa Keuangan, 2013, BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012*, *Siaran Pers BPK*, Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Darno, 2013. *Analisa Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran : Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang*, *Skripsi*, Malang, Universitas Brawijaya.

El Hida, Ramdhania, 2012, *3.750 Bidang Lahan Milik Negara Tak Bersertifikat (Online)*, <http://finance.detik.com/read/2012/10/02/131026/2052524/4/3750>), diakses 01 April 2013.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.

Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry dan Warfield Terry D, 2012, *Intermediate Accounting, Fourteen Edition*, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

Robbins, Stephen P., 2006, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT. Indeks.

Siregar, Doli D., 2004, *Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waloejo, Herry, 2012, *Overview Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum dan Sesudah Reformasi Keuangan Negara*, Jakarta, BPPK.